

Dana Hibah Buleleng

Naik Rp 33,3 Miliar

DI Buleleng, dana hibah 2016 naik Rp 33,3 miliar atau naik 94,1 persen. Inilantaran pada 2015 sebesar Rp 35,4 miliar, dan untuk 2016 dirancang Rp 68,7 miliar.

Pemerintah dan wakil rakyat, sama-sama kompak menunggu aturan hukum yang mengizinkan lembaga adat menerima dana hibah. "Sebagian besar memang muaranya akhirnya ke desa pakraman. Misalnya untuk subak, untuk sekaa gong, untuk sekaa-sekaa yang melakukan kegiatan berkesenian, *truna-truni*. Kalau ke kelompok masyarakat seperti nelayan itu, tidak terlalu besar," ungkap Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Masih terkait hibah, wakil rakyat Klungkung Sang Nyoman Putra Yasa meminta Bupati Klungkung Nyoman Suwirta berani mencairkan dana hibah yang sudah dipasang tersebut. Katanya, Dewan Klungkung sudah berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pasca keluarnya UU 23/2014. Menurut Putra Yasa, hibah tetap dapat

dicairkan sepanjang sudah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini diakuinya, sudah disampaikan kepada Eksekutif.

Sekkab Klungkung Putu Gede Winastra mengakui masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) dari Gubernur Bali. Jumlah dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan Klungkung Rp 7,5 miliar. Anggota Dewan Klungkung mendapat jatah memfasilitasi dana hibah masing-masing Rp 250 juta. Sementara untuk pimpinan dapat Rp 400 juta.

Sedangkan Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, Rabu lalu (4/11) mengatakan, seluruh anggota Dewan Tabanan tidak ada yang ngotot merdesak dana hibah cair.

Menurutnya, dalam pidato pengantar yang disampaikan pihak eksekutif, diketahui ada dana hibah sebesar Rp 3 miliar yang akan digelontorkan dan mengarah untuk elemen-elemen yang berbadan hukum nasional seperti KONI dan PMI.

Sedangkan pada perubahan pihaknya hanya memprogramkan hibah untuk pilkada, yakni, sebesar Rp 2,5 miliar untuk Polres dan Rp 500 juta untuk Kodim.

Sedangkan Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata mengatakan, jika pencairan dana hibah yang kurang maksimal ini membuat kecewa para anggota Dewan. Di Bangli, besaran dana hibah yang diajukan mencapai Rp 35 miliar, hanya saja dana tersebut tidak semuanya cair. Hanya ada Rp 15 miliar saja yang sudah cair dari APBD induk.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karangasem I Ketut Sedana Merta mengatakan, soal hibah sempat menjadi pergunjingan antara eksekutif dengan legislatif. Pergunjungan itu terjadi, diduga karena anggota DPRD sudah telanjur berjanji kepada masyarakat.

Di Gianyar, hingga awal November ini, dari total dana hibah yang difasilitasi DPRD Gianyar, baru sekitar 65 persen dari total dana hibah lewat dewan yang

berhasil dicairkan penerima. Sisanya pun terancam tidak dapat dicairkan. "Tahun ini memang persentasenya rendah. Dari total Rp 34 miliar hibah yang difasilitasi Dewan, masing-masing Rp 22 miliar di (APBD) induk dan Rp 12 miliar di (APBD) perubahan, baru sekitar 65 persen yang sudah cair. Sisanya masih belum jelas. Bahkan untuk yang di perubahan sama sekali belum ada yang cair," ucap Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta belum lama ini.

Untuk Jembrana, dana hibah yang masuk di APBD Jembrana sampai saat ini sudah tersalur. Dana hibah itu tidak terfokus di satu SKPD tetapi tersebar di masing-masing SKPD dan tidak ada yang dibawa oleh anggota DPRD Jembrana. "Sampai saat ini anggota DPRD termasuk saya tidak memiliki dana hibah untuk disalurkan ke masyarakat. Padahal hibah itu sangat penting," ujar ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa. (eps/trs/zul/wan/wid/nom/djo)



DEWAN TUDING EKSEKUTIF INGKAR JANJI

Kalangan DPRD Badung kebakaran jenggot begitu Eksekutif memutuskan tidak bisa mencairkan dana hibah. Tidak hanya sewot karena kesal, wadil rakyat Badung itu juga menanggung malu besar. Pasalnya, selama ini mereka sudah telanjur menjajikan pencairan dana hibah pada konstituennya. Dengan yakin mereka mengatakan pada konstituen, proposal bantuan hibah akan segera cair. Akankah segera cair?

DEWAN boleh berharap, tapi janji tinggal janji. Nyatanya, eksekutif tidak mau menanggung risiko. Pemerintah lebih memilih mematuhi surat edaran (SE) Mendagri; dana hibah bisa diberikan kepada lembaga berbadan hukum. Tak pelak, kalangan Dewan kelimpungan karena sering didatangi anggota masyarakat. "Saya terus ditagih. Saya dianggap memakan hibah. Mau ditaruh di mana muka kami anggota Dewan ini?", kata anggota Komisi IV DPRD Badung Nyoman Sentana, Jumat lalu (6/11).

Sentana pantas gundah. Sebab, politisi Gerindra ini sudah satu tahun anggaran gigit jari. Pada APBD perubahan 2015 dana hibah yang dia ajukan tidak cair. Pun dengan APBD induk 2016. Dana hibahnya juga diampunsi. Sentana mengaku frustasi menghadapi polemik dana hibah. "Saya memfasilitasi 40 proposal. Semuanya tidak ada yang cair. Saya siap dikerangkeng kalau memang tidak tepat sasaran. Saya dan Dewan lain sudah kehilangan muka di masyarakat," ucapnya jengkel.

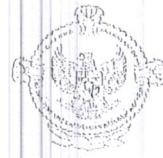
Sentana menuduh polemik dana hibah disengaja Eksekutif. Jika pemerintah serius, tidak ada masalah dengan pencairan dana hibah. SE Mendagri

yang dijadikan dalih tidak bisa mencairkan dana, Eksekutif disebut tidak mempunyai kekuatan tetap. Menurut Sentana, SE bukan undang-undang atau peraturan pemerintah (PP) yang bersifat mengikat. Dia pun menuding pemerintah sengaja menciptakan kegaduhan politik melalui hibah.

Disinggung hibah tidak cair karena bisa dijadikan alat kampanye pilkada, Sentana mengaku tak sepakat. Pria asal Blahkiuh, Abiansemal, ini, menyebut hibah sudah jelas penerimanya. Pemanfaatan dana hibah juga sudah jelas. Dewan, lanjut dia, hanya memfasilitasi. Sementara survei lokasi, penerima, proses administrasi dan laporan pertanggungjawaban langsung ditangani Eksekutif. "Sudah lah Eksekutif jangan memancing keributan di Badung. Hibah ini sudah disetujui dalam APBD dan sudah diketuk palu. Tapi sengaja tidak dicairkan. Eksekutif cuci tangan. Kau yang berjanji kau yang mengingkari," sindirnya.

Jumlah dana hibah yang difasilitasi Dewan di Badung sangat besar. Bisa menjadi terbesar dibandingkan anggota Dewan di kabupaten/kota lain di Bali. Dana hibah Badung dialokasikan sekitar Rp 150 miliar. Menurut Sentana, pada

Radar Bali



Sambungan ---

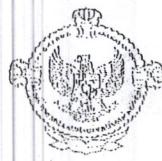
Persyaratan Pencairan Dana Hibah:

1. Menyampaikan surat permohonan realisasi pencairan dana bantuan hibah kepada Gubernur Bali Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Bali yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan melampirkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kegiatan yang disesuaikan dengan bantuan hibah yang akan diterima serta jadwal kegiatan.
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - c. Pakta Integritas.
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawaban.
 - e. Foto copy KTP ketua, sekretaris, dan bendahara yang masih berlaku.
 - f. Foto copy buku rekening tabungan/giro yang masih aktif dan dilegalisir oleh pihak bank.
 - g. Meterai Rp 6.000 sebanyak 6 (enam) lembar.
 - h. Menanda tangani kuittansi yang telah disediakan.
 - i. Menyampaikan proposal permohonan bantuan (awal pengajuan).
2. Persyaratan dimaksud masing-masing dibuat dalam tiga rangkap dan disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan bantuan sosial dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Provinsi Bali.

APBD Perubahan 2015 lalu, satu orang anggota Dewan dijatah Rp 750 juta. Sedangkan pada APBD induk 2016 satu orang anggota Dewan digelontor Rp 1,5 miliar. "Hibah ini kan untuk pembangunan fisik. Untuk memperbaiki pura, *bale kulkul* dan sebagainya. Kalau takut dikorupsi, bisa semua rakyat Badung ikut dipenjara," bebernya.

Sementara itu, juru bicara Pemkab Badung, AA Raka Yuda alias Gung Raka

menilai tuduhan yang dialamatkan kepada Eksekutif tidak benar. Menurut Gung Raka, pemerintah sudah berusaha maksimal agar permasalahan hibah selesai tanpa meninggalkan masalah. "Intinya kami selalu bersinergi dengan dewan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apa yang menjadi misi dan visi Eksekutif juga adanya dukungan Dewan. Kalau tidak, maka tidak dijalani," kata Gung Raka normatif. (**maulana sandijaya/djo**)



Konsultasi ke BPK, Bukan Mendagri

DENPASAR - Karena belum ada aturan turunan dari UU 23/2014, anggota DPRD Kota Denpasar tidak mau ambil risiko terkait dana hibah. Sebab penerima hibah harus berbadan hukum yang sah dengan akte notaris. Makanya, anggaran untuk dana hibah Rp 101,3 miliar tersebut kini harus menganggur.

Salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar AA Gede Mahendra dari Golkar mengungkapkan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko sebelum keluarnya aturan jelas mengenai penerima maupun penyaluran dana hibah tersebut. Apalagi saat ini sedang momen pilkada yang bisa dibawa pada kepentingan politik tertentu. "Harus ada aturan teknis yang mengatur, karena dalam UU 23/2014 tersebut tidak dijelaskan tentang aturan teknisnya," terangnya, saat dihubungi, Jumat lalu (6/11).

Makanya, ia juga menilai, pihak-pihak yang tetap ngotot menginginkan dana hibah tersebut dicairkan, tidak pernah membaca tentang aturannya.

Terkait adanya dugaan motif politis di dalamnya, Gede Mahendra pun membenarkan hal tersebut. Apalagi saat ini momen pilkada, terlebih bila ada *incumbent* yang maju. "Kami hanya ingin semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dikatakan Mahendra, pihaknya beberapa kali mendapat informasi dari beberapa pihak bahwa dana hibah boleh diberikan kepada organisasi atau kelompok yang sudah terdaftar dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). "Apa cukup hanya terdaftar saja di Kesbangpol bisa menerima hibah? Ini yang meski diperjelas. Kami juga tidak berani menerobos kalau belum jelas," terang kader Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat AA Susruta Ngurah Putra, juga enggan menindaklanjuti masalah hibah tersebut. "Silakan kalau memang fraksi lain yang menafsirkan berbeda mengenai undang-undang tersebut. Dicairkan saja, kami tentu belum siap," ujarnya.

Susruta menginginkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dana hibah termasuk juga Pemerintah Kota Denpasar untuk segera berjanji mengenai aturan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena sebagai memeriksa BPK yang lebih tahu aturan jelasnya. "Jangan konsultasinya ke Kementerian Dalam Negeri. Jelas-jelas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) yang lebih tahu teknisnya dan penyalurannya," imbuhnya. (hen/djo)



Mengawal Dana Hibah dari Kepentingan Politik

12 Ribu Proposal Tersandera

Perubahan regulasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) 23/2014 membuat sejumlah wakil rakyat di Bali galau. Dalihnya, ditagih warga yang mengajukan proposal. Padahal, sepatutnya dana itu memang harus steril dari kepentingan politik.

BEBERAPA anggota Dewan Bali, kabupaten/kota, membantah mereka ngotot agar dana hibah cair itu jauh dari kepentingan politik. Khususnya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Desember mendatang.

Dewan boleh saja demikian. Namun, faktanya, ada salah satu Fraksi yang mengklaim telah sukses memperjuangkan lolosnya anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ujung-ujungnya, kader partai politik (parpol) itu

meminta pihak yang diuntungkan dengan lolosnya anggaran tersebut, untuk turut membantu sukses pasangan calon (paslon) yang digadang parpol tersebut dalam pilkada serentak. Padahal, sudah sewajarnya anggota Dewan terlibat dalam pengajuan anggaran lewat APBD ■

► *Baca 12 Ribu... Hal 31*

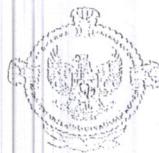
**COVER
STORY**

Dewan Tuding
Eksekutif Ingkar Janji
Baca di Halaman 22

Bila Dana Hibah Tak Bisa Dicairkan

1. Mengganggu proses pelaporan di akhir tahun oleh masing-masing satuan kerja.
2. Rendahnya serapan anggaran dan membengkaknya sisa lebih anggaran (silpa) pada APBD Induk 2016.
3. Akibat penyerapan anggaran kurang bagus juga berdampak terhadap perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat Bali, perekonomian akan ikut melemah.





Sambungan --

Silpa Anggaran Induk

2016 Bisa Membengkak

■ 12 RIBU...

Sambungan dari hal 21

Di satu sisi, bukan hanya masyarakat yang sudah mengajukan proposal pengajuan dana, namun hampir mayoritas anggota DPRD Bali juga mendesak agar dana yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat ini segera bisa dicairkan. Munculnya kegalauan masyarakat dan anggota DPRD Provinsi Bali ini karena pasca perubahan regulasi pencairan dana hibah dan bantuan sosial yang mengharuskan bagi penerima hibah dan bantuan berbadan

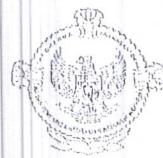
hukum, berdampak pada tersandarnya sekitar 12.000 proposal milik masyarakat se-Bali dengan nilai mencapai Rp 200 miliar lebih.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali, Wayan Disel Astawa saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mendesak kepada seluruh kepala daerah dari mulai gubernur Bali, bupati/wali kota se-Bali, pihak Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali untuk segera mengambil langkah cepat guna mencari solusi

secara bersama terkait persoalan dana hibah. "Bila perlu, kami akan mendorong kepada semua pemangku kebijakan untuk bersama-sama melakukan komitmen dengan mengawal dana hibah ini dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU)," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi PDIP asal Ungasan, Kuta Selatan, ini, juga menambahkan, dengan makin sempitnya waktu dan dekatnya masa tutup buku, maka pihaknya bukan hanya khawatir, jika dengan masih tersandarnya dana hibah dan bantuan berdampak

pada pelaporan di akhir tahun oleh masing-masing satuan kerja, melainkan jika hingga November dari hasil verifikasi Peraturan Gubernur (Pergub) yang sebelumnya diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta tidak ada kejelasan, maka hal ini juga akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan membengkaknya sisa lebih anggaran (Silpa) pada anggaran Induk 2016. "Jadi ini bukan persoalan kepentingan kami. Namun ini yang hampir sebagian masyarakat pertanyakan saat kami (ang-



Radar Bali

Sambungan ~ ~

gota Dewan, Red) melakukan reses. Banyak dari masyarakat seperti kelompok banjar, PKK, desa dinas, maupun desa adat yang mempertanyakan masalah ini. Tentu sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban untuk memperjuangkannya," terangnya.

Senada dengan Diesel, Ketua Pansus APBD Bali 2016, Ketut Kariyasa Adnyana, juga menambahkan, bahwa ancaman kecilnya serapan Silpa itu karena baik masyarakat, Legislatif, dan Eksekutif di Bali akan sangat berhati-hati. "Kalaupun tidak ada payung hukum yang mengatur, tentu akan terjadi banyak Silpa pada APBD induk 2016," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Kariasa, dari kondisi di Bali, kecuali yayasan, sangat sedikit sekali kelompok mas-

yarakat yang memiliki badan hukum. Sementara di sisi lain, desa adat ataupun desa pakraman belum berbadan hukum seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. "Disini akan jadi kendala besar dalam pencairan dana hibah ataupun bantuan sosial," tambahnya.

Selain itu, politisi asal Buleleng ini juga menambahkan, jika terjadi banyak Silpa, maka dampaknya adalah dana hibah dan bansos tidak bisa dicairkan. "Dan hal ini menunjukkan penyerapan anggaran kurang bagus. Dampaknya jelas terhadap perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat Bali," tandasnya.

Apalagi, masih kata Kariasa, secara umum, kondisi ekonomi nasional sedang melambat. "Pencairan dan hibah bansos

yang lancar dipastikan akan berpengaruh positif terhadap perputaran ekonomi dan akan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat," tegasnya.

Lalu bagaimana dengan kesan bahwa desakan Dewan soal hibah syarat bermuatan politis jelang pilkada serentak? "Kami tidak berkepentingan untuk itu (pilkada, Red), melainkan kami berharap, jangan kemudian dengan adanya temuan penyelewengan, kemudian pusat membuat regulasi yang justru merugikan masyarakat. Selama melalui verifikasi yang jelas dan dana bisa diper tanggungjawabkan, maka tidak ada alasan bagi pusat untuk menggeneralisasi bahwa seluruh bansos dan hibah diselewengkan," pungkasnya. (didik dwi praptono/djo)



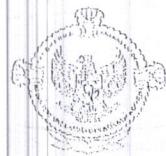
Pemprov Tegaskan Akan Segera Cair

DENPASAR – Macetnya pencairan dana hibah, akibat adanya regulasi baru yang mewajibkan penerima hibah harus berbadan hukum membuat sejumlah pimpinan Dewan di lingkungan DPRD Provinsi Bali geram. Bukan saja sempat "ngambul" dengan memboikot rapat pembahasan APBD Induk 2016, namun akibat kekecewaan, sejumlah pimpinan Dewan mulai ketua DPRD Bali, dan perwakilan komisi, badan anggaran (banggar) hingga perwakilan Fraksi beberapa waktu lalu langsung *ngelurug* Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Para pimpinan ini selain ingin memastikan soal hasil verifikasi Peraturan Gubernur (Pergub) yang sebelumnya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, juga ingin mencari solusi agar proses pencairan bisa segera dilaksanakan. Reaksi Eksekutif atas reaksi dan desakan dewan Bali soal dana bantuan hibah dan dana bansos?

Bahkan, saat memberikan paparan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Gubernur secara gamblang menyampaikan bahwa persoala payung hukum dengan adanya amanat UU 33/2014 adalah sebagai penyebab tersandarnya ribuan proposal pengajuan hibah yang diajukan masyarakat Bali. Dilatakan, sejak adanya UU tersebut, pihak Eksekutif mengaku sudah melakukan berbagai upaya. Sebagai harapan dana hibah bisa dicairkan.

Namun, dengan segala upaya yang dilakukan, akhirnya persoalan pencairan dana hibah dan bansos mulai ada titik terang. Terbaru, dari paparan Mangku Pastika dan Sekretaris Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun bahwa, terkait hasil verifikasi Pergub yang sebelumnya diajukan ke Mendagri RI di Jakarta sudah turun: "Sabtu, seminggu lagi dana hibah dan bansos sudah bisa dicairkan," papar Gubernur. (pra/djo)



Radar Bali



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

PUSAT KEGIATAN UMAT: Pembangunan Bale Banjar Aseman ci Abiansemal, Badung. Proyek seperti ini boleh untuk mengajukan dana hibah.

Pengamat Nilai Rentan Diselewengkan

MOMEN politik atau pilkada serentak memang sangat rentan untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mengeruk uang negara.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) I Nyoman Subanca berharap, pemerintah pusat dapat lebih tegas dan jelas lagi masalah aturan, sehingga pemberian hibah tepat sasaran, dan jelas keperuntukannya. "Ini tiba-tiba diberikan hibah, Dewan bingung mau diberikan ke siapa, terus asal member-

ikan saja, sementara aturan dilanggar. Ujung-ujungnya menjadi temuan di kemudian hari, kan ini yang repot," terangnya, saat dihubungi, Jumat lalu (6/11).

Subanda juga mengatakan, pencairan dana hibah ini juga sangat rentan akan kasus hukum. Sebab kadang karena membela salah satu calon, akhirnya dana hibah digunakan untuk kampanye. "Praktik-praktik seperti ini sering terjadi di hampir semua daerah bukan hanya di Denpasar dan Bali secara keseluruhan saja, tetapi di luar Bali juga," terangnya.(hen/djo)

gan, laporkan! (dikti dwi praptono)

dana. Jika tetapi penyelenggaraan atau pengembangan pelaporan atau pertanggungjawaban penyelenggaraan dilakukam dari sejak pengajuan, pencarian, hingga pemerintah harus secara bersama-sama ikut menepati tadi, seluruh masarakat, legislatif, dan jurnalistik serentak?

5. Apa yang harus dilakukan agar penyelenggaraan dana hibah tak terjadi. Terlebih jangan pilihada atau investigasi masalah hibah?

4. Apakah ORI Bali pernah menerima laporan atau investigasi masalah hibah?

3. Legislatif mengotak hibah di cakikan. Anda melihat ini bagian dari kependidikan politik?

Meski secara langsung tidak, namun partai di dunia bahwa di lembaga politik seperti Dewan, tentu ada kepentingan politik di dalamnya. Namun, bagi kaum, telah ada tindaknya kepentingan politik soal (hibah) ini, harapan kami padaanya yakni dalam dala masyarakat kita keberhasilan masa lalu, dan lebih pesan itu, pilihan inu untuk memilih program lain, kami berharap dengan adanya penyampaian anggota parlemen tak mengungkit keberhasilan masa lalu.

Tujuannya?

1. Anda memiliki pasangan calon (paslon) ini-

Va, kami berharap dengan adanya penyampaian mesion jolakan pada program baru, maka hal itu juga tidak menguntungkan kita keberhasilan masa lalu, dan lebih jauh dari yang sudah diketahui. Sehingga dengan pesan itu, pilihan inu untuk memilih program lain yang selanjutnya datang dari upaya merealisasikan masalah hibah.

2. Pendapat Anda soal pele-

dan banjir. Sampai saat ini belum. Selain itu, secara spesifik memang kami belum pernah melakukannya kajiannya maupun invesigasi soal penyelenggaraan dana hibah dan banjir.

3. Apakah ORI Bali pernah menerima laporan atau investigasi masalah hibah?

4. Apakah ORI Bali pernah menerima laporan atau investigasi masalah hibah?

5. Apa yang harus dilakukan agar penyelenggaraan dana hibah tak terjadi. Terlebih jangan pilihada atau investigasi masalah hibah?

3. Legislatif mengotak hibah di cakikan. Anda melihat ini bagian dari kependidikan politik?

Meski secara langsung tidak, namun partai di dunia

banjir ikut mengawasi dari mulai pengajuan hingga penyelesaiannya.

Tentu untuk mengantispasi, ketimbang DPU itu sudah jelas, lam UU 23/2014 tentang Permenko danispasi semua sudah ditariknya. Kean rencana kami, namun sebagaimana rancangan pilihada (dana hibah) itu bu-

Meskipun (dana hibah) itu bu-

saat pilihada?

ang dana hibah diselenggarakan

2. Pendapat Anda soal pele-

ba yang selanjutnya.

menyampaikan pada program baru, maka hal itu juga menguntungkan kita keberhasilan masa lalu, dan lebih jauh dari yang sudah diketahui. Sehingga dengan pesan itu, pilihan inu untuk memilih program lain yang selanjutnya datang dari upaya merealisasikan masalah hibah.

1. Anda memiliki pasangan calon (paslon) ini-

Va, kami berharap dengan adanya penyampaian mesion jolakan pada program baru, maka hal itu juga tidak menguntungkan kita keberhasilan masa lalu.

Tujuannya?

2. Pendapat Anda soal pele-

ba yang selanjutnya.

menyampaikan pada program baru, maka hal itu juga menguntungkan kita keberhasilan masa lalu, dan lebih jauh dari yang sudah diketahui. Sehingga dengan pesan itu, pilihan inu untuk memilih program lain yang selanjutnya datang dari upaya merealisasikan masalah hibah.

3. Apakah ORI Bali pernah menerima laporan atau investigasi masalah hibah?

4. Apakah ORI Bali pernah menerima laporan atau investigasi masalah hibah?

5. Apa yang harus dilakukan agar penyelenggaraan dana hibah tak terjadi. Terlebih jangan pilihada atau investigasi masalah hibah?

3. Legislatif mengotak hibah di cakikan. Anda melihat ini bagian dari kependidikan politik?

Meski secara langsung tidak, namun partai di dunia



Ajak Seluruh Element

Masyaraka Mengawasi

Reaksi ORI Bali Soal Kemungkinan
Penyalahgunaan Dana Hibah

